



INNOVATIVE: Journal Of Social Science Research

Volume 4 Nomor 2 Tahun 2024 Page 3298-3309

E-ISSN 2807-4238 and P-ISSN 2807-4246

Website: <https://j-innovative.org/index.php/Innovative>

## Memerangi Kealpaan Karyawan Di Sumatera Utara: Perspektif Akuntansi Syariah Dalam Akuntansi Pertanggungjawaban

Devi Fitriya Ningsih<sup>1✉</sup>, Kamilah, K<sup>2</sup>

Universitas Islam Negeri Sumatera Utara

Email: [devifitriyaningsih678@gmail.com](mailto:devifitriyaningsih678@gmail.com)<sup>1✉</sup>

### Abstrak

Setiap pusat pertanggungjawaban mempunyai seorang manajer yang mengawasi kegiatan-kegiatan yang terjadi di pusat pertanggungjawaban. Secara berkala manajer akan membenarkan hasil pekerjaannya kepada pimpinan perusahaan. Ada empat jenis pusat tanggung jawab, yaitu pemberian tanggungjawab, pembuatan ukuran kerja, pengevaluasian kerja, dan pemberian penghargaan. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengumpulkan informasi tentang akuntansi pertanggungjawaban yang tersedia. Selain itu, penelitian ini akan menyelidiki apakah akuntansi syariah sesuai dengan penerapan akuntansi pertanggungjawaban di Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Sumatera Utara dengan mempertimbangkan tiga prinsip akuntansi syariah prinsip keadilan, transparansi dan akuntabilitas. Dalam penilaian pengukuran kinerja manajer pusat pertanggungjawaban, terdapat tiga jawaban yang menggunakan kinerja, yaitu efisiensi, efektivitas, dan ekonomis.

Kata Kunci: *Pusat pertanggungjawaban Akuntansi Syariah, Kinerja Karyawan dan Manajer*

### Abstract

Each responsibility center has a manager who oversees the activities that occur in the responsibility center. Periodically the manager will justify the results of his work to the company leadership. There are four types of responsibility centers, namely giving responsibility, making work measurements, evaluating work, and giving awards. The purpose of this research is to collect available information about responsibility accounting. In addition, this research will investigate whether sharia accounting is in accordance with the implementation of responsibility accounting in the North Sumatra Regional Office of the Ministry of Law and Human Rights by considering the three principles of sharia accounting, namely justice, transparency and accountability. In assessing the performance measurement of responsibility center managers, there are three answers that use performance, namely efficiency, effectiveness and economics.

Keywords: *Responsibility Center, Sharia Accounting, Employee and Manager Performance*

## PENDAHULUAN

Setiap organisasi di dunia bisnis mutakhir yang penuh dengan perkembangan dan persaingan harus melihat jauh ke depan untuk mengharapkan hasil potensial berbeda yang dapat mempengaruhi kemajuan mereka. Setiap organisasi memiliki tujuan yang ingin dicapai, seperti mendapatkan lebih banyak uang, menghasilkan keuntungan, menciptakan, dan membuat kesuksesan bagi masyarakat. Dengan kemajuan dan iklim bisnis yang sangat membingungkan, upaya manajemen puncak untuk mencapai tujuan organisasi menjadi semakin sulit dan membingungkan. Untuk mengatasi hal ini, organisasi harus memperoleh data yang diperlukan untuk navigasi.

Akuntansi pertanggungjawaban adalah suatu sistem akuntansi yang dirancang sedemikian rupa sehingga biaya dan laporan pendapatan dilakukan di pusat pertanggungjawaban perusahaan, sehingga individu atau kelompok dapat diidentifikasi untuk bertanggung jawab atas perbedaan pendapatan dan biaya yang direncanakan. Dengan menggunakan akuntansi pertanggungjawaban, para pimpinan dapat mendelegasikan tugas dan wewenang ke bawahan mereka dengan lebih efisien tanpa melihat seluruh operasi perusahaan. Akuntansi pertanggungjawaban menjadi sangat penting bagi perusahaan untuk mengetahui bagaimana manajer melakukan tugas mereka untuk mencapai target pendapatan.

Menurut Islam, kinerja adalah cara seseorang mengaktualisasikan dirinya. Ini adalah representasi nyata dari nilai, kepercayaan, dan pemahaman yang dianut, yang didasarkan pada prinsip-prinsip moral yang kuat, dan dapat berfungsi sebagai inspirasi untuk menghasilkan karya yang berkualitas. Penilaian kinerja, menurut Mulyadi, adalah evaluasi yang dilakukan secara berkala untuk mengevaluasi seberapa baik operasi suatu organisasi, bagian organisasi, dan karyawannya sesuai dengan sasaran yang ditetapkan.

Pekerja dan manajer dapat tetap tertarik dengan pembukuan pertanggungjawaban, yang dapat digunakan untuk mengevaluasi presentasi mereka dan mungkin mendesak direktur untuk memperbaiki pelaksanaannya yang tidak tepat. Inspirasi yang diperluas secara implisit akan mendorong seseorang untuk memberikan yang terbaik untuk mencapai tujuannya. Imbalan langsung, misalnya imbalan atau kemajuan atas kemajuan, dan hadiah yang berputar-putar, misalnya tunjangan bantuan pemerintah, dapat meningkatkan inspirasi. Pembukuan kewajiban juga memberikan hadiah dan disiplin apabila kehadiran perwakilan dan pengurus fokus kewajiban dianggap tidak sesuai pada saat ujian pelaksanaan. Pembukuan kewajiban memberi energi pada peningkatan atau pencapaian yang lebih baik.

Informasi akuntansi pertanggungjawaban merupakan informasi yang penting dalam proses perencanaan dan pengendalian aktivitas organisasi, karena informasi tersebut menekankan hubungan antara informasi dengan manajer yang bertanggung jawab terhadap perencanaan dan realisasinya. Untuk sampai pada kesimpulan tentang organisasi sebenarnya atau bagian-bagiannya, para eksekutif di berbagai tingkat asosiasi memerlukan data moneter. Daripada pihak luar yang membutuhkan data moneter untuk mengambil kesimpulan mengenai hubungannya dengan suatu organisasi, para direktur memerlukan data moneter tersebut sebagai alasan untuk sampai pada kesimpulan tentang organisasi atau bagian yang dipimpinya. Siklus pembukuan semacam ini dan meneruskan informasi moneter kepada supervisor. Keputusan yang diambil oleh pihak luar tidak sama dengan keputusan yang diambil oleh pimpinan sehingga mempengaruhi kualitas sistem penanganan data pembukuan yang menghasilkan data keuangan. Data tentang pengeluaran, pendapatan, dan sumber daya yang berkaitan dengan kepala yang bertanggung jawab atas suatu komunitas kewajiban tertentu dikenal sebagai data pembukuan kewajiban. Setiap pemimpin hierarki bertanggung jawab mengatur pengeluaran dan pendapatan sambil membuat rencana pengeluaran, yang diselesaikan di bawah koordinasi administrasi puncak. Untuk melaksanakan suatu rencana keuangan, data pembukuan diharapkan dapat menyaring sejauh mana setiap supervisor melakukan pengaturannya.

Ada 4 jenis habitat tanggung jawab: fokus biaya, fokus pendapatan, fokus manfaat, dan fokus usaha. Pemerintahan lingkungan sekitar adalah titik fokus tanggung jawab. Hingga tingkat tindakan, misalnya kantor atau subbagian, tempat tugas ini kemudian dipecah menjadi beberapa unit kecil. Setiap kewajiban masyarakat harus membuat rencana pengeluaran untuk rencana kerja dan evaluasi pelaksanaannya. Asosiasi di dalamnya harus memimpin ujian pelaksanaan, yang digunakan oleh dewan untuk mensurvei seberapa baik kinerja asosiasi selama jangka waktu tertentu. Evaluasi pelaksanaan memerlukan informasi pembukuan pertanggungjawaban untuk digunakan sebagai semacam perspektif. Setiap tempat tugas memiliki seorang supervisor yang bertanggung jawab atas kegiatan yang terjadi di tengah-tengah yang dipimpinya, dan para pemimpin ini akan sesekali melaporkan pekerjaan mereka ke inisiatif organisasi.

Dalam hal ini sering terjadi di dalam suatu organisasi dimana karyawan sering melakukan kesalahan atau bahkan teledor atas apa yang sudah ditugaskan kepada mereka yang menyebabkan tugas yang telah diberikan tidak tepat sasaran. Dengan mempertimbangkan dan beberapa dampak yang timbul dalam kinerja karyawan, khususnya dalam prinsip-prinsip akuntansi syariah dalam akuntansi pertanggungjawaban. Bahwa

dalam penelitian ini, peneliti membatasi pada karyawan di Kanwil Kemenkumham Sumatera Utara.

## METODE PENELITIAN

Metode penelitian yang dipakai pada penelitian ini adalah menggunakan system pendekatan kepustakaan (library research), biasa studi pustaka ini disebut kepustakawanan, dan itu menyiratkan berbagai macam kegiatan yang berhubungan dengan pengumpulan informasi, membaca dan mencatat serta mengawasinya sebagai bahan ujian. Informasi yang digunakan dalam penelitian ini dikumpulkan untuk menyelidiki, menyelidiki dan membedah berbagai sumber tertentu, misalnya buku harian, buku atau bahkan arsip yang berisi informasi atau data yang berkaitan dengan penelitian ini. Akuntansi Pertanggungjawaban.

## HASIL DAN PEMBAHASAN

### Informasi Akuntansi Pertanggungjawaban

Akuntansi pertanggungjawaban adalah sebuah sistem yang mencerminkan berbagai pencapaian dalam suatu posisi tugas berdasarkan data yang dibutuhkan para pemimpin dalam menjalankan jaringan tugas (Hansen dan Mowen, 2005). Pembukuan kewajiban merupakan suatu kerangka yang dirancang untuk disesuaikan dengan kewajiban masyarakat dalam mengumpulkan dan merinci pengeluaran dan pembayaran, selain itu juga dimaksudkan untuk menjamin bahwa seseorang dianggap bertanggung jawab atas penyimpangan rencana pengeluaran yang terjadi (Mulyadi, 2001a). Sementara itu, tujuan pembukuan pertanggungjawaban adalah untuk mengendalikan biaya dengan mengumpulkan, mencatat, menjumlahkan, dan bermitra dengan individu yang bertanggung jawab atas biaya-biaya dalam ruang pertanggungjawabannya (Mulyadi, 2001b).

Pekerja dan manajer dapat tetap tertarik dengan pembukuan pertanggungjawaban, yang dapat digunakan untuk mengevaluasi presentasi mereka dan mungkin mendesak direktur untuk memperbaiki pelaksanaannya yang tidak tepat. Inspirasi yang diperluas secara implisit akan mendorong seseorang untuk memberikan yang terbaik untuk mencapai tujuannya. Imbalan langsung, misalnya imbalan atau kemajuan atas kemajuan, dan hadiah yang berputar-putar, misalnya tunjangan bantuan pemerintah, dapat meningkatkan inspirasi. Pembukuan kewajiban juga memberikan hadiah dan disiplin apabila kehadiran perwakilan dan pengurus fokus kewajiban dianggap tidak sesuai pada saat ujian pelaksanaan. Pembukuan kewajiban memberi energi pada peningkatan atau pencapaian yang lebih baik.

Informasi akuntansi pertanggungjawaban merupakan informasi yang penting dalam proses perencanaan dan pengendalian aktivitas organisasi, karena informasi tersebut menekankan hubungan antara informasi dengan manajer yang bertanggungjawab terhadap perencanaan dan realisasinya. Untuk sampai pada kesimpulan tentang organisasi sebenarnya atau bagian-bagiannya, para eksekutif di berbagai tingkat asosiasi memerlukan data moneter. Daripada pihak luar yang membutuhkan data moneter untuk mengambil kesimpulan mengenai hubungannya dengan suatu organisasi, para direktur memerlukan data moneter tersebut sebagai alasan untuk sampai pada kesimpulan tentang organisasi atau bagian yang dipimpinya. Siklus pembukuan semacam ini dan meneruskan informasi moneter kepada supervisor. Keputusan yang diambil oleh pihak luar tidak sama dengan keputusan yang diambil oleh pimpinan sehingga mempengaruhi kualitas sistem penanganan data pembukuan yang menghasilkan data keuangan. Data tentang pengeluaran, pendapatan, dan sumber daya yang berkaitan dengan kepala yang bertanggung jawab atas suatu komunitas kewajiban tertentu dikenal sebagai data pembukuan kewajiban. Setiap pemimpin hierarki bertanggung jawab mengatur pengeluaran dan pendapatan sambil membuat rencana pengeluaran, yang diselesaikan di bawah koordinasi administrasi puncak. Untuk melaksanakan suatu rencana keuangan, data pembukuan diharapkan dapat menyaring sejauh mana setiap supervisor melakukan pengaturannya. Oleh karena itu, data pembukuan kewajiban adalah alasan untuk merinci pencapaian para pemimpin dan sekaligus mendorong mereka untuk melaksanakan rencana yang diilustrasikan dalam rencana keuangan mereka. Manfaat informasi akuntansi pertanggungjawaban: data masa depan penting untuk perencanaan, sementara data masa lalu dapat digunakan untuk mengevaluasi seberapa baik kinerja manajer pusat pertanggungjawaban dan untuk memotivasi mereka (Samba et al., 2022)

Manfaat Akuntansi Pertanggung Jawaban Bagi Para Manajer Menurut Mulyadi (2001 : 174) "informasi akuntansi pertanggungjawaban yang berupa informasi masa lalu bermanfaat sebagai penilai kinerja manajer pusat pertanggungjawaban dan pemotivasi manajer." Akuntansi pertanggungjawaban sangat diperlukan dan bermanfaat bagi perusahaan besar yang kegiatan usahanya memerlukan pembagian tugas dan tanggung jawab.

### Penilaian Kinerja

Kinerja adalah gambaran sejauh mana suatu tindakan dapat membantu melaksanakan tujuan, sasaran, dan standar asosiasi, serta bagaimana memahami tujuan tersebut dalam persiapan penting organisasi, menurut Mahsun (2006). Masing-masing asosiasi berkeyakinan bahwa pelaksanaan administrasinya harus berjalan dengan baik. Untuk

melakukan perhitungan eksekusi, diperlukan evaluasi; ini memungkinkan Anda untuk membedah pelaksanaan administrasi asosiasi sebagai beruntung atau tidak. Menurut Sukarno (2002), penilaian pelaksanaan adalah suatu pekerjaan untuk mengukur keberhasilan atau kekecewaan suatu unit yang berwenang dalam melaksanakan usaha dan kemampuan yang diberikan kepadanya. Rudianto (2013) mengatakan bahwa evaluasi pameran mengawasi kegiatan otoritatif secara sukses dan efektif dengan menambah inspirasi pekerja; menjadi alasan untuk memutuskan panggilan perwakilan (seperti kemajuan, perpindahan dan alasan); memahami kebutuhan dan prasyarat asosiasi untuk SDM; dan mengumpulkan data tentang eksekusi pekerja dari penilaian inisiatif. Alasan dilakukannya evaluasi yang representatif adalah untuk memberikan motivator kepada pekerja sehingga mereka dapat mencapai tujuan hierarkis dan menyetujui pengaturan umum sehubungan dengan perspektif yang diakui (Utami et al., 2019).

Penilaian kinerja adalah salah satu fungsi manajemen kinerja yang menilai seberapa berat kontribusi karyawan terhadap permasalahan. Dalam Total Quality Manajemen (TQM) penilaian, pengendalian dan pengawasan suatu aktivitas harus dilaksanakan sejak awal proses. Dengan demikian kesalahan dapat diminimalisir. (Mangkunegara, Anwar, P, 2013)

Penilaian kinerja di Kantor Wilayah Kementriam Hukum dan Hak Asasi Manusia Sumatera Utara didasarkan kepada Sasaran Kinerja Pegawai (SKP). Sasaran Kinerja Pegawai ini dibuat setahun sekali. Penilaian kinerja berdasarkan pencapaian kerja dan perilaku karyawan. Dalam pencapaian kerja karyawan dinilai dari seberapa banyak realisasi atau penyerapan anggaran yang didapat oleh pegawai terkait berdasarkan pembebanan tanggungjawab program yang dibebankan.

Memperbaiki kinerja seorang pegawai akan berdampak langsung pada perusahaan. Ini adalah tugas yang sulit dan memakan waktu. Ini dapat dicapai melalui peningkatan pengawasan dan pembinaan. Bisa juga dilakukan dengan menilai tingkat keberhasilan kerja yang telah dilakukan. Salah satu keuntungan dari melakukan penilaian kinerja ini adalah bahwa itu memberikan standar untuk memperbaiki kinerja karyawan (Hanifah & K., 2022).

#### Perspektif Akuntansi Syariah dalam Akuntansi Pertanggungjawaban

Akuntansi syariah adalah kata dasar dari akuntansi syariah. Definisi akuntansi bebas adalah pencarian transaksi yang kemudian diikuti dengan pencatatan, penggolongan, dan pengikhtisaran transaksi sehingga laporan keuangan yang dapat digunakan untuk pengambilan keputusan dihasilkan. Namun, syariah dapat didefinisikan sebagai aturan yang telah ditetapkan oleh Allah untuk diikuti oleh manusia. Dalam bahasa Arab, akuntansi disebut muhasaba, berasal dari kata habasa, hasiba, muhasabah, atau wazan, yang berarti

menimbang, memperhitungkan, mengkalkulasikan, mendata, atau menghisab, yang berarti menghitung dengan teliti yang harus dicatat dalam pembukuan. Jadi, akuntansi syariah adalah akuntansi yang berorientasi sosial, yang berarti bahwa itu memberikan penjelasan tentang bagaimana fenomena ekonomi terjadi dalam masyarakat Islam selain menerjemahkannya ke dalam ukuran moneter.

Semua transaksi yang terjadi dilaporkan dengan benar, jujur, dan teliti sesuai dengan hukum Islam. Laporan hitungan akhir dan neraca keuangan harus dibuat dengan amanah oleh orang yang menyiapkannya. Dalam pengolahan laporan keuangan pusat pertanggungjawaban, transparansi sangat penting, meskipun ia harus memaparkan apa yang layak dan menyembunyikan rahasia-rahasia yang harus ia jaga secara syar'i. Ini sesuai dengan aturan akuntansi syariah. Prinsip akuntansi syariah meliputi:

1. Pertanggungjawaban

Tanggung jawab adalah keadaan di mana Anda harus menanggung segala sesuatu. Dalam hal ini, tanggung jawab didefinisikan sebagai kesadaran seseorang akan kewajiban untuk menanggung semua konsekuensi dari tindakannya. Pertanggungjawaban berkaitan dengan keyakinan bahwa segala sesuatu akan bertanggung jawab baik di dunia maupun di akhirat. Banyak ayat membahas bagaimana manusia bertanggung jawab atas pekerjaan mereka sebagai pelaksana amanah Allah di dunia ini. Pertanggungjawaban memiliki peran dalam menjalankan sesuatu; dalam praktik bisnis, pertanggungjawaban harus selalu dilakukan.

2. Prinsip Keadilan

Salah satu prinsip penting dalam etika kehidupan sosial dan bisnis adalah prinsip keadilan, yang merupakan nilai yang melekat dalam fitrah manusia dan menunjukkan bahwa manusia pada dasarnya memiliki kekuatan dan kemampuan untuk bertindak adil dalam setiap aspek kehidupan mereka. Prinsip keadilan adalah nilai penting dalam etika kehidupan karena menunjukkan keharmonisan antara hak dan kewajiban. Ini juga merupakan nilai yang ada dalam diri manusia sejak lahir.

3. Prinsip Kebenaran

Prinsip keadilan sebenarnya tidak dapat dipisahkan dari konsep ini. Sebagai contoh, kami selalu menghadapi masalah pengakuan dan pengukuran laporan. Nilai kebenaran akan memungkinkan aktivitas ini berjalan dengan baik. Nilai kebenaran akan memungkinkan pengakuan, pengukuran, dan laporan transaksi ekonomi yang adil. Jadi, ketika akuntansi Islam berkembang, prinsip-prinsip kebenaran, kejujuran, dan keadilan harus diterapkan dalam praktik akuntansi. Bagaimana akuntansi syari'ah dibentuk oleh prinsip kebenaran dapat dijelaskan secara ringkas.

Dengan mempertimbangkan tiga prinsip tersebut, dapat disimpulkan bahwa analisis akuntansi syariah dalam hal penerapan akuntansi pertanggungjawaban telah sesuai dengan tiga prinsip tersebut. Dimana upaya untuk bertanggung jawab atas semua tugas dilakukan dengan tepat sasaran. Untuk memenuhi prinsip kebenaran, kemudian ada laporan pertanggungjawaban. Studi ini menunjukkan bahwa sistem akuntansi pertanggungjawaban yang digunakan oleh karyawan di Kanwil Kemenkumham Sumatera Utara sudah memenuhi standar akuntansi pertanggungjawaban. Karena telah memenuhi tiga persyaratan penerapan, serta persyaratan akuntansi pertanggungjawaban dan ciri-cirinya. Karena telah memenuhi prosedur, sistem akuntansi pertanggungjawaban dianggap sangat baik.

#### Pengukuran Kinerja Manajer Pusat Pertanggungjawaban

Sistem akuntansi pertanggungjawaban pada dasarnya merupakan sistem pelaporan informasi keuangan menurut manajer yang bertanggung jawab atas terjadinya informasi tersebut (Mulyadi, 2007), Sistem akuntansi pertanggungjawaban menghasilkan informasi akuntansi pertanggungjawaban berupa informasi yang akan datang dan bermanfaat untuk penyusunan anggaran, sedangkan informasi masa lalu bermanfaat sebagai penilaian prestasi manajemen. pusat pertanggungjawaban dan memotivasi manajer.

Dalam akuntansi pertanggungjawaban perusahaan dibagi menjadi berbagai unit kegiatan yang disebut pusat pertanggung jawaban (responsibility center). Akuntansi pertanggungjawaban secara otomatis akan berfungsi sebagai alat pemotivasi. Setiap manajer pusat pertanggungjawaban akan memiliki motivasi untuk berusaha jika ia berkeyakinan akan memiliki nilai penghargaan yang tinggi atau berkeyakinan bahwa dengan kinerja yang bagus akan lebih memperoleh aktualisasi dari dalam perusahaan. Dalam usaha untuk melakukan penilaian kinerja terhadap suatu perusahaan terlebih dahulu yang harus dilakukan. adalah menetapkan dengan jelas daerah. pertanggungjawaban yang menjadi wewenangnya. Dalam penentuan daerah pertanggungjawaban harus melihat tipe pusat pertanggungjawaban yang dapat dibagi menjadi 4 (empat) macam yaitu pusat biaya, pusat pendapatan, pusat laba, dan pusat investasi (S. Munawir, 2006) dalam Sanjaya, 2012)

Pusat biaya adalah pusat pertanggungjawaban yang manajernya hanya bertanggungjawab terhadap biaya, dan keberhasilannya manajernya diukur atas dasar masukan atau biaya yang terjadi. Pusat Biaya diukur prestasinya dengan mencari selisih biaya sesungguhnya dengan biaya yang dianggarkan. Pusat pendapatan adalah pusat pertanggungjawaban yang manajernya hanya bertanggungjawab terhadap penjualan atau pendapatan, dan prestasinya diukur atas dasar pendapatan yang diperoleh tanpa harus memperhatikan biaya atau masukan yang terjadi. Pusat Pendapatan diukur prestasinya

dengan mencari selisih pendapatan sesungguhnya dengan pendapatan yang dianggarkan (Slamet Sugiri dan Sulastiningsih, 2004),

Pusat laba adalah pusat pertanggungjawaban yang manajemya harus bertanggungjawab terhadap pendapatan dengan biaya yang terjadi pada pusat laba tersebut, dan manajemya diukur prestasinya atas dasar laba yang diperoleh. Dalam mengukur kinerja pusat laba perlu juga dibandingkan antara laba yang dihasilkan dich perusahaan dengan volume penjualan yang ingin dicapai oleh perusahaan dengan mempergunakan rasio-rasio profitabilitas yaitu Gross Profit Margin, Operating Profit Margin, dan Net Profit Margin.

Gross Profit Margin dipergunakan. untuk mengukur berapa besar laba kotor yang dihasilkan dibandingkan dengan total nilai penjualan bersih perusahaan. Semakin besar asio ini menunjukkan bahwa perusahaan mampu menekankan kenaikan harga. pokok penjualan pada persentase kenaikan. penjualan. Operating Profit Margin biasanya disebut pure profit dalam arti bahwa profit yang dihasilkan benar-benar mumi dari hasil operasi perusahaan sebelum diperhitungkan.

Pusat investasi adalah pusat pertanggungjawaban yang manajemnya bertanggungjawab terhadap pendapatan, biaya, dan investasi yang terjadi pada pusat pertanggungjawaban tersebut. Prestasi manajer pusat investasi diukur atas dasar laba yang dihasilkan dibandingkan dengan aktiva yang digunakan untuk menghasilkan laba tersebut, yang dalam hal ini dapat dipergunakan 2 (dua) alternatif. Return On Investment (ROI), Residual Income (RI) dan Return On Equity (Abdul Halim dan Bambang Supomo, 2005)

Komitmen yang dapat dibuat oleh suatu divisi untuk mencapai tujuan atau pelaksanaan organisasi adalah perkiraan komitmen yang dapat dibuat oleh suatu divisi untuk mencapai tujuan organisasi. Kemahiran, kelayakan, dan keekonomian merupakan tiga norma yang digunakan untuk menilai penyelenggaraan pameran penyelenggara fokus kewajiban. Kecukupan adalah hubungan antara hasil yang harus dicapai suatu organisasi dan tujuannya, sedangkan produktivitas adalah pemeriksaan antara hasil yang diciptakan dan seberapa banyak informasi yang dimanfaatkan. Tujuan yang otoritatif selalu dikaitkan dengan produktivitas, dan efektivitas yang tidak ekonomis berarti memanfaatkan aset potensial dasar. Dalam menyelesaikan tugasnya, suatu tempat kewajiban harus memenuhi ketiga prasyarat tersebut. Setelah mempelajari berbagai fokus tanggung jawab di atas, pengawas fokus kewajiban menggunakan informasi dan informasi hasil untuk menilai pameran mereka. Direktur fokus biaya menggunakan biaya sebagai proporsi presentasinya, dan direktur fokus pendapatan menggunakan pendapatan sebagai proporsi pamerannya.

Dalam komunitas ventura, presentasi pengawas tempat kewajiban diperkirakan melalui proporsi keuntungan terhadap spekulasi atau sisa gaji.

### Syarat-Syarat Penerapan Akuntansi Pertanggungjawaban

Mulyadi (2010:218) mengatakan bahwa akuntansi pertanggungjawaban merupakan sistem akuntansi yang disusun sedemikian rupa sehingga pengumpulan dan pelaporan biaya serta pendapatan dilakukan sesuai dengan pusat pertanggungjawaban dalam organisasi, dengan tujuan agar dapat ditunjuk orang atau kelompok orang yang bertanggungjawab atas penyimpangan biaya dan pendapatan yang dianggarkan. Dari pengertian tersebut, dapat dijelaskan bahwa syarat untuk dapat menerapkan akuntansi pertanggungjawaban yaitu:

#### a. Struktur Organisasi

Dalam akuntansi pertanggungjawaban struktur organisasi harus menggambarkan aliran tanggungjawab, wewenang, dan posisi yang jelas untuk setiap unit kerja dari setiap tingkat manajemen. Struktur organisasi harus menggambarkan pembagian tugas dengan jelas sehingga wewenang akan mengalir dari tingkat manajemen atas ke bawah, sedangkan tanggung jawab adalah sebaliknya.

#### b. Anggaran

Setiap pusat pertanggungjawaban dalam akuntansi pertanggung jawaban harus turut serta dalam penyusunan anggaran. Karena anggaran tersebut merupakan gambaran rencana kerja para manajer yang akan dilaksanakan dan sekaligus dasar dalam penilaian kinerja.

##### a) Penggolongan Biaya

Penggolongan biaya ke dalam kategori biaya terkendalikan dan tidak terkendalikan perlu dilakukan dalam akuntansi pertanggungjawaban, karena manajer tidak dapat mengendalikan semua biaya yang terjadi di dalam satu bagian. Oleh karena itu, hanya biaya-biaya yang terkendalikan yang harus dipertanggungjawabkan oleh manajer.

##### b) Sistem Akuntansi Biaya

Setiap tingkat manajemen dalam perusahaan merupakan pusat biaya dan akan dibebani dengan biaya-biaya yang terjadi didalamnya yang dipisahkan antara biaya terkendalikan dan biaya tidak terkendalikan. Selanjutnya, biaya yang terjadi akan dikumpulkan untuk setiap tingkatan manajer. Maka biaya harus digolongkan dan diberi kode sesuai dengan tingkatan manajemen yang terdapat dalam struktur organisasi.

### c) Sistem Pelaporan Biaya

Bagian akuntansi biaya setiap bulannya membuat laporan pertanggungjawaban untuk setiap pusat-pusat biaya yang isi laporan tersebut akan disesuaikan dengan tingkatan manajemen yang akan menerimanya.

Pusat pertanggungjawaban Asosiasi yang terdiri dari masing-masing unit kerja yang bertanggung jawab atas pelaksanaan tugas yang dilakukan oleh supervisor oleh unit kerja yang dipimpinnya. Dalam kegiatan ini, sebuah asosiasi terdiri dari berbagai komunitas kewajiban yang berbeda. Tingkat progresif dalam asosiasi terdiri dari semua tempat kewajiban ini. Pada tingkat yang lebih signifikan, fokus obligasi berbentuk kantor atau divisi. Pada tingkat yang lebih rendah, fokus kewajiban disusun dalam segmen-segmen yang umumnya berputar berdampingan dengan unit kerja lainnya. Ungkapan "fokus kewajiban" dapat digunakan secara eksklusif untuk organisasi tingkat kecil atau bahkan lebih rendah. Tempat pertanggungjawabannya adalah bagian dari perkumpulan yang jenis kegiatannya diserahkan tanggung jawabnya kepada pengawas (Hansen dan Mowen, 2005).

## SIMPULAN

Melihat pentingnya akuntansi pertanggungjawaban, maka setiap perusahaan seharusnya mempunyai kecenderungan untuk menerapkan semua tahapan kegiatan dalam pusat pertanggungjawaban. Semua transaksi yang terjadi dilaporkan dengan benar, jujur, dan teliti sesuai dengan hukum Islam. Laporan hitungan akhir dan neraca keuangan harus dibuat dengan amanah oleh orang yang menyiapkannya. Dalam pengolahan laporan keuangan pusat pertanggungjawaban, transparansi sangat penting, meskipun ia harus memaparkan apa yang layak dan menyembunyikan rahasia-rahasia yang harus ia jaga secara syar'i.

Sistem akuntansi pertanggungjawaban mengukur rencana dan tindakan dari setiap pusat pertanggungjawaban dalam sebuah organisasi, yang dipimpin oleh seorang manajer yang bertanggung jawab atas kinerja pusat pertanggungjawaban tersebut. Informasi yang dihasilkan meliputi biaya, pendapatan, dan aktiva yang terkait dengan manajer yang bertanggung jawab atas pusat pertanggungjawaban tersebut.

Penerapan akuntansi pertanggungjawaban di Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Sumatera Utara dinilai telah berjalan dengan baik dan sudah sesuai dengan Akuntansi Syariah. Ini terbukti dari evaluasi yang menunjukkan penerapan yang baik. Kantor tersebut telah mengidentifikasi pusat-pusat pertanggungjawaban dan menetapkan standar untuk menilai kinerja, dengan prestasi manajerial dievaluasi melalui perbandingan

antara anggaran dan realisasinya.

#### DAFTAR PUSTAKA

- Analisis Efektivitas Penerapan Akuntansi Pertanggungjawaban Pada Pegawai Kantor Kecamatan Labuhan Deli Kabupaten Deli Serdang. Madani: Jurnal Ilmiah Multidisiplin, 1(8).
- Hanifah, L., & K., K. (2022). Peran Kepemimpinan Terhadap Kinerja Pegawai di BAPPEDA Provinsi Sumatera Utara. *El-Mal: Jurnal Kajian Ekonomi & Bisnis Islam*, 4(4), 982–990. <https://doi.org/10.47467/elmal.v4i4.2369>
- Hansen, D. R., & Mowen, M. M. (2005). *Management Accounting* (7th ed.). Salemba Empat.
- Idris, Amiruddin. 2016. *Pengantar Ekonomi Sumber Daya Manusia*. Yogyakarta: Deepublish.
- Mahsun, M. (2006). *Pengukuran Kinerja Sektor Publik* (1st ed.). BPF.
- Mangkunegara, Anwar Prabu. 2013. *Manajemen Sumber Daya Manusia Perusahaan*. Bandung: PT Remaja Rosdakarya.
- Mulyadi. (2001a). *Akuntansi Manajemen: Konsep, Manfaat dan Rekayasa* (2nd ed.). STIE YKPN.
- Mulyadi. (2001b). *Akuntansi Manajemen: Konsep, Manfaat dan Rekayasa* (3rd ed.).
- M.Mowen. (2013). *Akuntansi Manajerial* (edisi ke 8). (Deny Arnos Kwary, Terjemahan). Jakarta: Salemba Empat.
- Sambas, Y., Mardiani, S., & Ripaldo Hsb, M. R. (2023). Penerapan Akuntansi Pertanggungjawaban sebagai Alat Penilaian Kinerja Pusat Biaya: . *Economic Reviews Journal*, 3(1), 18–32. <https://doi.org/10.56709/mrj.v3i1.101>
- Sukarno, E. (2002). *Sistem Pengendalian Manajemen Kinerja Konsep, Aplikasi dan Pengukuran Kinerja*. Indeks.
- Sari, A. P., Munawaroh, A., & Akbar, R. (2023). Penerapan Informasi Akuntansi Pertanggungjawaban Dalam Menilai Kinerja Manajer Pusat Biaya Pada PT. Bank Syariah Indonesia Cabang Meda. *Jurnal Publikasi Sistem Informasi dan Manajemen Bisnis*, 2(1), 75-85.
- Wilmar, C. D., Pangemanan, S. S., & Tirayoh, V. Z. (2019). Penerapan Akuntansi Pertanggungjawaban Sebagai Alat Penilaian Kinerja Manajer Pusat Pendapatan Pada Pt. Wahana Wirawan Manado-Nissan Datsun Martadinata. *Jurnal EMBA: Jurnal Riset Ekonomi, Manajemen, Bisnis Dan Akuntansi*, 7(1).